

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2010). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Makasar: Graha Ilmu.
- Badjuri, Achmad dan Elisa, Trihapsari, 2004, "Audit Kinerja pada Organisasi Sektor Publik Pemerintah".
- Christiaens, J., (1999). Financial accounting reform in Flemish municipalities: Anempiricalinvestigation. *Financial Accountability and Management* 15 (1), 21-40.
- Craven, B., Marston, C., (1999).Financial reporting on the internet by leading UK companies.*The European Accounting Review* 8(2), 321-333.
- Evans, J., Patton, J., 1987. Signaling and monitoring in public sector accounting. *Journal ofAccounting Research* 25 (Supplement), 130-158.
- Fadzil, Faudziah Hanim, dan Nyoto, Harryanto. (2011). *Fiscal Decentralization after Implementation of Local Government Autonomy in Indonesia*. *World Review of Business Research* Vol 1 No, 2 pp 51-70.
- Giroux, Gary dan Andrew J. McLelland, 2003, 'Governance Structures and Accounting at Large Municipalities', *Journal of Accounting and Public Policy*, 22, pp. 203-230.
- Hilmi, A. Z. Dan D. Martani. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XV. Banjarmasin.
- Ingram, Robert W & Douglas V. De. Jong 1987, 'The Effect of Regulation on Local Government Disclosure Practices', *Journal of Accounting and Public Policy*, vol. 6, issue 4, pp. 245-269.
- Ingram, Robert W. (1984). *Economics Incentives and the Choice of StateGovernment Accounting Practices*. *Journal of Accounting Research*. Vol. 22. No. 1. pp 126-144.
- Khasanah, NurLailatul. (2014). *Pengaruh Karakteristik Kompleksitas dan Temua Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi Sarjana.Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

- Laswad, Fawzi, Fisher, Richard, dan Oyelere, Peter. (2005). *Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities*. Journal of Accounting and Public Policy 24. pp 101-121.
- Liestiani, Annisa. (2008). *Pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2006*. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.
- Mulyana, Budi. 2006. *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2, No.1, Mei 2006. <http://www.bppk.depkeu.go.id/index.php/2008050880/jurnalakuntansipemerintah.html>. Diakses tanggal 22 Desember 2010.
- Peraturan Mendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.
- Prasojo, Eko, Maksum, Irfan Ridwan, dan Kurniawan, Teguh. (2006). *Desentralisasi & Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural*. Depok: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Puspita, R. Dan D. Martani. (2012). *Analisis Pengaruh Kinerja Dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Dan Kualitas Informasi Dalam Website Pemda*. FEUI. Depok.
- Rahmandkk (2013). *Determinan Internet Finance Local Government Reporting di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi XVI. September.
- Retina, Zelda. (2008). *Tingkat Kepatuhan Pemerintah Kabupaten Kota Di Indonesia Terhadap PP No. 24 Tahun 2005 Dan Hubungannya Dengan PAD Dan Total Aktiva*. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.
- Robbins, Walter A., dan Austin, Kenneth R. (1984). *Disclosure Quality in Governmental Financial Reports: An Assessment of the Appropriateness of a Compound Measure*. Journal of Accounting Research. Vol 24. No. 2. pp 412-421.

Suhardjanto, D. Dan Rena. R. Y. (2011). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi. Surakarta.

Sukmaningrum, Tantriani. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi Sarjana. FEUNDIP. Semarang.

Supranto, (2000). *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Erlangga.

Sinaga, Y. F. dan Prabowo (2012). *Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Di Internet Secara Sukarela Oleh Pemerintah Daerah*. Skripsi Sarjana. FEUNDIP. Semarang.

Sinaga, Y. F. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Di Internet Secara Sukarela Oleh Pemerintah Daerah*. Skripsi Sarjana. FEUNDIP. Semarang.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang No 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Wulandari, RizkiSafitri. (2013). *PengaruhUkuran Daerah, Kekayaan Daerah, Temuan Audit BPK danBelanja Daerah terhadap Tingkat PengungkapanPelaporanKeuanganPemerintah Daerah di Indonesia melaluiWebsite*. SkripsiSarjana.FakultasEkoomiUniversitasSebelasMaret Surakarta.

Zimmerman, Jerold L. 1977. "The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives". *Journal of Accounting Research*. Vol. 15, Studies on Measurement and Evaluation of the Economic Efficiency of Public and Private Nonprofit Institutions. pp. 107-144.